

PENDAMPINGAN TATA KELOLA SIMPAN PINJAM PKK RW 03 KENDALPECABEAN UNTUK DISTRIBUSI SHU TRANSPARAN DAN ADIL

Henrycus Winarto Santoso^{1*},
Siti Aminah²,
Helmi Muhammad³,
Lanny Kusuma Widjaja⁴, Valerina Vivi
Widyadana⁵

Magister Ekonomi, Universitas Surabaya¹
Informatika, Universitas Bhinneka
Nusantara²
Manajemen, Universitas Islam Raden
Rahmat³
Manajemen, Universitas Surabaya⁴
Ekonomi Pembangunan; Universitas
Surabaya⁵

Article history

Received : 23 Mei 2026

Revised : 19 Juni 2026

Accepted : 22 Juni 2026

*Corresponding author

Email : henrycus@staff.ubaya.ac.id

ABSTRAK

Kelompok Simpan Pinjam PKK RW 03 Desa Kendalpecabean, Sidoarjo, memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan berbasis masyarakat bagi 215 kepala keluarga. Namun demikian, praktik pelaporan keuangan yang dijalankan masih belum sepenuhnya transparan, dan mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berlaku belum mencerminkan tingkat partisipasi ekonomi masing-masing anggota secara memadai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat menerapkan pendekatan partisipatif guna memperkuat tata kelola keuangan kelompok simpan pinjam. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini melibatkan 53 peserta yang terdiri atas 7 orang pengurus dan 46 orang anggota. Pelaksanaan program difokuskan pada tiga kegiatan utama, yaitu sosialisasi prinsip-prinsip tata kelola keuangan, pelatihan perhitungan SHU, serta pendampingan praktik penerapan sistem pencatatan keuangan menggunakan spreadsheet sederhana. Evaluasi program menggunakan metode *Outcome Evaluation* dengan fokus pada perubahan riil yang terjadi pada mitra setelah dilakukan intervensi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengelolaan SHU serta pentingnya penggunaan sistem pembukuan berbasis spreadsheet. Peserta juga mampu menerapkan sistem pencatatan yang baru dan menyepakati revisi mekanisme distribusi SHU menjadi berdasarkan tingkat partisipasi ekonomi anggota. Distribusi SHU yang baru mendukung pembentukan dana cadangan, dana sosial, dan insentif bagi pengurus. Penerapan pembukuan berbasis spreadsheet selain memberikan kemudahan juga memungkinkan keterlacakan informasi keuangan bagi anggota kelompok. Sebagai upaya menjaga keberlanjutan program, beberapa anggota dipersiapkan untuk mengoperasikan sistem pembukuan secara mandiri. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada perbaikan praktik tata kelola keuangan, khususnya dalam pengelolaan pencatatan keuangan dan mekanisme distribusi SHU. Perubahan yang telah dicapai diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan kelompok simpan pinjam PKK di masa mendatang.

Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan; Distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU); Kelompok Simpan Pinjam PKK; Transparansi Keuangan; Partisipatif.

ABSTRACT

Serving 215 households, the PKK savings and loan group in RW 03, Kendalpecabean Village, Sidoarjo, functions as an important community-based financial institution. Despite its contribution, several governance challenges remain. Financial reports are prepared regularly; however, they are not consistently communicated to members, thereby limiting transparency and accountability. In addition, the current SHU distribution system allocates returns equally among members without adequately considering differences in savings and borrowing activities. As a result, the distribution mechanism does not fully reflect members' economic participation in the group. Using a participatory approach, this community service program aimed to strengthen the financial governance of the savings and loan group. The one-day program involved 53 participants, consisting of 7 board members and 46 group members. The implementation method was realized through three core activities: socializing financial governance principles, conducting training on SHU calculation and providing hands-on mentoring for the implementation of a financial recording system utilizing simple spreadsheet. Program evaluation uses the Outcome Evaluation method with a focus on real changes that

occur in partners after the intervention is carried out. The outcome evaluation indicated noticeable improvement among participants. Beyond gaining a better understanding of financial governance and reporting practices, participants started using spreadsheet templates to record savings, loans, and SHU calculations in a more structured manner. Participants also demonstrated the ability to apply the new recording system and agreed on a revised SHU distribution mechanism based on members' economic participation. The partner group agreed on a revised SHU distribution formula that reflects members' economic participation. The initiative also led to the establishment of reserve funds, social funds, and management incentives. In addition, spreadsheet-based bookkeeping improved the accessibility and traceability of financial records for group members. To support the continuity of the initiative, selected members were trained to independently operate the bookkeeping system. The intervention strengthened the group's financial governance by improving record-keeping practices and revising the SHU distribution mechanism to better reflect members' economic participation. These changes are expected to strengthen the sustainability of the savings and loan group.

Keywords: Financial Governance; Surplus Earnings Distribution (SHU); PKK Savings and Loan Group; Financial Transparency; Participatory.

© 2022 Damkar

PENDAHULUAN

Kelompok simpan pinjam berbasis komunitas merupakan salah satu instrumen penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi rumah tangga yang membutuhkan pembiayaan skala kecil dengan prosedur yang sederhana dan mudah dijangkau (Ayunda et al., 2025; Kusumah & Novani, 2024). Selain menyediakan akses permodalan, model keuangan berbasis komunitas juga berkontribusi terhadap penguatan modal sosial, peningkatan literasi keuangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Alshebami & Murad, 2022; Jensen & Naveed, 2025).

Salah satu bentuk implementasi keuangan mikro berbasis komunitas tersebut adalah kegiatan simpan pinjam yang dikelola oleh organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di RW 03 Desa Kendalpecabean, Kabupaten Sidoarjo, kelompok simpan pinjam PKK telah beroperasi selama kurang lebih dua tahun dan saat ini melayani 215 kepala keluarga. Kegiatan ini menjadi salah satu sumber pembiayaan yang mudah dijangkau masyarakat karena menawarkan proses peminjaman yang fleksibel dan dekat dengan kebutuhan anggota. Kegiatan operasional kelompok mengelola perputaran dana antara 70–100 juta rupiah per bulan dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan sebanyak 6 juta rupiah pada tahun 2025. SHU tahunan merupakan akumulasi SHU bulanan, di mana SHU bulanan didapat dari penghasilan bunga pinjaman bulan tersebut dikurangi biaya operasional rutin, biaya dana sosial dan biaya bunga bagi pemodal pada bulan tersebut.

Meskipun aktivitas simpan pinjam berjalan dengan baik, hasil observasi awal dan diskusi dengan pengurus menunjukkan bahwa kelompok masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola keuangan. Pertama, besar SHU tahunan seluruhnya langsung dibagikan kepada anggota, akibatnya kelompok tidak memiliki dana cadangan maupun aset. Kedua, mekanisme pembagian SHU tahunan tidak didasarkan pada kontribusi anggota. SHU dibagikan sama rata kepada semua anggota. Ketiga, sebagian besar anggota belum

memahami konsep dasar dan mekanisme perhitungan SHU, sehingga proses pengambilan keputusan sangat bergantung pada pengurus. Keempat, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar fisik yang menyulitkan proses verifikasi data dan penyusunan laporan. Kelima, informasi mengenai proses perhitungan SHU belum terdokumentasi dan tersampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota sehingga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tata kelola keuangan yang baik merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan lembaga keuangan berbasis komunitas (Kassim et al., 2018). Pengelolaan yang transparan dan akuntabel memungkinkan anggota memahami bagaimana manfaat ekonomi organisasi dihasilkan dan didistribusikan (Jamaluddin et al., 2023; Renz et al., 2023). Selain itu, pembagian SHU yang memperhatikan partisipasi ekonomi anggota merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam pengelolaan organisasi berbasis anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebaliknya, rendahnya pemahaman anggota mengenai mekanisme SHU dan keterbatasan transparansi dapat menurunkan partisipasi serta kepercayaan terhadap organisasi (Gultom et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, pengurus kelompok simpan pinjam PKK RW 03 Desa Kendalpecabean menyampaikan kebutuhan untuk mendapatkan pendampingan eksternal guna memperbaiki tata kelola keuangan organisasi. Menanggapi kebutuhan tersebut, tim pengabdian melaksanakan program pendampingan berbasis *participatory capacity building* yang menempatkan anggota dan pengurus sebagai pelaku utama perubahan. Kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman anggota mengenai prinsip pembagian SHU yang berkeadilan, penyusunan formula distribusi SHU berbasis jasa modal dan jasa usaha, serta pendampingan implementasi sistem pencatatan keuangan digital sederhana guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kelompok simpan pinjam PKK RW 03 Desa Kendalpecabean.

METODE PELAKSANAAN

Mitra dan Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian diikuti oleh 53 peserta yang terdiri atas 7 orang pengurus dan 46 orang anggota nonpengurus. Keterlibatan pengurus dan anggota dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tata kelola keuangan tidak hanya dipahami oleh pengurus, tetapi juga memperoleh dukungan dan legitimasi dari anggota sebagai pemangku kepentingan utama.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama satu hari dengan menggunakan pendekatan *participatory capacity building*. Pendekatan ini menempatkan anggota dan pengurus sebagai pelaku utama dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, serta implementasi solusi sehingga kapasitas organisasi dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan (Danquah et al., 2023; Eade, 1997; Kacou et al., 2022).

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama yang dirancang berdasarkan permasalahan tata kelola keuangan yang dihadapi mitra, yaitu rendahnya pemahaman mengenai pembagian SHU yang berkeadilan, belum adanya formula distribusi SHU yang proporsional, dan keterbatasan sistem pencatatan keuangan. Setelah identifikasi masalah mitra, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui 5 tahapan kegiatan (lihat Gambar 1). Rincian pelaksanaan kegiatan ditunjukkan oleh Tabel 1.



Gambar 1. Diagram alir metode pelaksanaan kegiatan

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Waktu	Durasi	Tahapan Kegiatan	Kegiatan	Peserta
16:00 - 16:30	30 menit	Pembukaan	Pre-test dan Orientasi Program	seluruh peserta
16:30 - 17:15	45 menit	Materi 1: Sosialisasi norma Tata Kelola Keuangan pada kegiatan simpan pinjam	Pemaparan konsep tata kelola keuangan, prinsip keadilan ekonomi, dan pentingnya transparansi dalam organisasi	seluruh peserta
17:15 - 18:00	45 menit	Break	Istirahat	seluruh peserta
18:00 - 19:00	60 menit	Materi 2: Alokasi pembagian SHU yang berkeadilan	Pelatihan perhitungan SHU berbasis jasa modal dan jasa usaha; Praktik perhitungan menggunakan data riil kelompok	seluruh peserta
19:00 - 19:15	15 menit	Evaluasi 1	Post-Test	seluruh peserta
19.15 – 19.30	15 menit	Break	Makan malam	seluruh peserta
19.30- 20.30	60 menit	Materi 3: Pendampingan Implementasi Sistem pencatatan berbasis spreadsheet	Pelatihan dan Demonstrasi penggunaan sistem pencatatan berbasis spreadsheet; Praktek langsung pencatatan transaksi: Tanya Jawab	Pengurus: Menyajikan draft Non Pengurus: Mengkritisi
20.30-21:00	30 menit	Diskusi	Diskusi Keberlanjutan Program	seluruh peserta
21.00-21.15	15 menit	Penutup	Penutupan Acara	seluruh peserta

Sosialisasi Financial Governance

Tahap pertama bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam kegiatan simpan pinjam. Materi yang disampaikan meliputi prinsip-prinsip financial governance, konsep transparansi dan akuntabilitas, pentingnya pembentukan dana cadangan organisasi, serta prinsip pembagian SHU yang memperhatikan partisipasi ekonomi anggota. Pada tahap ini peserta juga diajak mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam sistem pengelolaan SHU yang selama ini diterapkan oleh kelompok.

Pelatihan Perhitungan SHU Partisipatif

Tahap kedua berupa pelatihan teknis mengenai mekanisme pembagian SHU yang lebih berkeadilan. Peserta diberikan pemahaman mengenai dua komponen utama pembagian SHU, yaitu jasa modal yang dihitung berdasarkan proporsi simpanan anggota, dan jasa usaha yang dihitung berdasarkan aktivitas pinjaman

anggota. Pelatihan dilaksanakan melalui metode simulasi menggunakan data keuangan kelompok sehingga peserta dapat memahami secara langsung perbedaan antara metode pembagian SHU yang digunakan sebelumnya dengan metode pembagian SHU berbasis kontribusi anggota.

Pendampingan Implementasi Sistem Pencatatan Digital

Tahap ketiga berupa pendampingan penerapan sistem pencatatan keuangan berbasis spreadsheet sederhana. Sistem dirancang secara partisipatif agar sesuai dengan kemampuan teknis pengurus dan kebutuhan organisasi. Spreadsheet yang dikembangkan memungkinkan pengurus mencatat simpanan anggota, transaksi pinjaman, pembayaran bunga, serta menghitung SHU secara otomatis. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, sistem ini juga dirancang untuk mendukung transparansi karena laporan keuangan dan perhitungan SHU dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh anggota (Asbaruna et al., 2026).

Evaluasi Keberhasilan Program

Tahap keempat, evaluasi kegiatan menggunakan pendekatan *Outcome Evaluation* yang berfokus pada perubahan yang terjadi pada mitra setelah intervensi dilakukan (Douthwaite et al., 2023). Evaluasi dilakukan terhadap dua indikator utama: Pertama, peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola keuangan dan pembagian SHU yang berkeadilan sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi *financial governance* dan pelatihan perhitungan SHU partisipatif. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* dengan skala Likert lima poin yang diberikan kepada seluruh peserta kegiatan. Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata dan standar deviasi sebelum dan sesudah kegiatan. Peningkatan nilai rata-rata menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, sedangkan penurunan standar deviasi menunjukkan bahwa pemahaman antar peserta menjadi lebih merata setelah kegiatan dilaksanakan; Kedua, kemampuan pengurus dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pembagian SHU yang lebih transparan dan proporsional. Indikator ini diukur melalui keberhasilan pengurus dalam menyusun rancangan formula pembagian SHU berbasis jasa modal dan jasa usaha, serta kemampuan mengoperasikan sistem pencatatan keuangan berbasis *spreadsheet* yang dikembangkan selama kegiatan pendampingan.

Penguatan Keberlanjutan Program

Tahap kelima, untuk menjamin keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian berakhir, tim pengabdian melakukan transfer pengetahuan kepada dua kader PKK yang ditunjuk sebagai operator internal. Kader tersebut memperoleh pendampingan khusus dalam pengoperasian *spreadsheet*, pengelolaan data keuangan, dan penyusunan laporan SHU sehingga organisasi memiliki sumber daya internal yang mampu melanjutkan sistem yang telah dikembangkan tanpa ketergantungan pada pendamping eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan kelompok simpan pinjam PKK RW 03 Desa Kendalpecabean melalui peningkatan kapasitas anggota dan pengurus dalam pengelolaan SHU yang transparan dan berkeadilan. Gambar 2 menunjukkan aktivitas kegiatan sosialisasi.

Evaluasi keberhasilan program dilakukan menggunakan pendekatan *Outcome Evaluation* dengan fokus pada perubahan yang terjadi pada sistem pengelolaan keuangan organisasi setelah dilakukan intervensi (Douthwaite et al., 2023). Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pada empat aspek utama, yaitu peningkatan pemahaman anggota mengenai prinsip tata kelola SHU, transformasi sistem pembagian SHU, digitalisasi pencatatan keuangan, dan penguatan keberlanjutan kelembagaan.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Financial Governance

Pemahaman Anggota Mengenai Tata Kelola Keuangan dan SHU yang Berkeadilan

Evaluasi pemahaman anggota dilakukan dengan metode analisis deskriptif sederhana melalui analisis perubahan skor rata-rata dan perubahan skor standar deviasi pemahaman peserta saat pretest dengan saat posttest. Peserta *pre-test dan peserta post-test adalah orang yang sama*. Responden adalah seluruh peserta pelatihan yang berjumlah 53 orang. *Pre-test dan post-test* berisikan pertanyaan yang sama dengan kuesioner berskala pengukuran Likert.

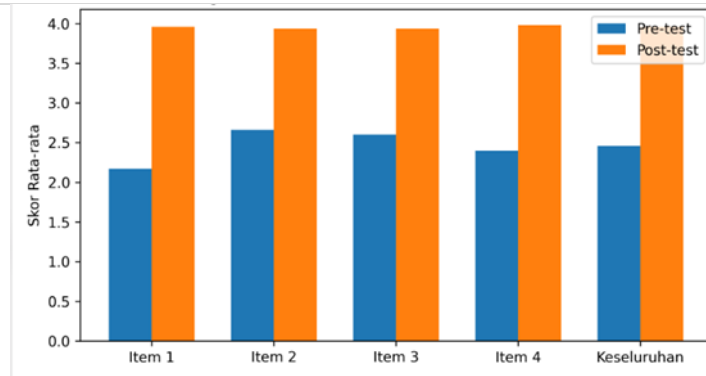
Hasil perbandingan *pre-test* dan *post-test* sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola keuangan dan pembagian SHU yang berkeadilan.

**Tabel 2. Pemahaman anggota mengenai konsep SHU:
Perbandingan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan**

Item Kuesioner	Skor Rata-rata		Standar Deviasi	
	Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
Item 1.	2,17	3,96	0,79	0,51
Item 2	2,66	3,94	0,64	0,36
Item 3	2,60	3,94	0,59	0,53
Item 4	2,40	3,98	0,53	0,24
Keseluruhan	2,46	3,96	0,54	0,24
Persentase Perubahan	-	60,97	-	(55,55)

Sebelum kegiatan dilaksanakan, skor rata-rata pemahaman peserta berada pada kisaran 2,17–2,66 yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggota belum memahami secara memadai prinsip pembagian SHU yang berkeadilan yaitu yang berdasarkan pada partisipasi ekonomi anggota (International Cooperative Alliance, 1995). Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, skor rata-rata pemahaman meningkat menjadi 3,94–3,98. Secara agregat, nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 2,46 menjadi 3,96. Perubahan nilai antara pre-test dan post-test diilustrasikan melalui Gambar 3.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa anggota telah memahami prinsip dasar tata kelola keuangan yang lebih transparan dan mekanisme pembagian SHU yang mempertimbangkan kontribusi ekonomi anggota.



Gambar 3. Grafik Perubahan Pemahaman Peserta

Selain peningkatan skor rata-rata, seluruh item kuesioner menunjukkan penurunan nilai standar deviasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman peserta menjadi lebih merata dibandingkan dengan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan demikian, program tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga mengurangi kesenjangan pemahaman antaranggota kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara lebih inklusif dan mampu menjangkau peserta dengan tingkat pengetahuan awal yang berbeda-beda (Sangwa et al., 2024; Shah et al., 2024).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Test

Data	W-statistic	p-value	Interpretasi
Pre-test	0,8834	0,0001	Tidak berdistribusi normal
Post-test	0,96	0,0003	Tidak berdistribusi normal

Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk Test (Shapiro & Wilk, 1965) menunjukkan $p < 0,05$. Ini berarti data tidak berdistribusi normal (lihat Tabel 3). Secara metodologis, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan uji Wilcoxon Signed-Rank Test (Wilcoxon, 1945) lebih sesuai. Meskipun demikian, paired-samples t-test (Student, 1908) tetap dilakukan sebagai analisis komparatif.

Tabel 4. Wilcoxon Signed-Rank Test keseluruhan

Parameter	Nilai
W-statistic	0.00
Rank biserial r	1,00
p-value	0,00
Signifikansi	Signifikan ($p < 0,001$)

Hasil uji Wilcoxon Signed-Rank Test untuk skor keseluruhan (lihat Tabel 4) dengan hasil ($W = 0$; $p < 0,001$; Rank biserial correlation $r = 1,0$) menunjukkan bahwa skor semua peserta meningkat setelah mengikuti pelatihan. Uji Wilcoxon Signed-Rank Test pada setiap item kuesioner (lihat Tabel 5) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan ($p < 0,001$).

Tabel 5. Wilcoxon Signed-Rank Test per Item

Item	Mean Pre-test	Mean Post-test	W	p-value
Item1	2,17	3,96	0,00	<0,001
Item2	2,66	3,94	0,00	<0,001
Item3	2,60	3,94	0,00	<0,001
Item4	2,40	3,98	0,00	<0,001

Hasil uji paired samples t-Test (Cohen,1988) terhadap skor total (lihat Tabel 6) juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anggota yang signifikan setelah kegiatan pendampingan. Besaran efek yang diperoleh sangat tinggi (Cohen's $d = 3,74$), menunjukkan bahwa kegiatan memberikan dampak yang sangat kuat terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep SHU.

Tabel 6. Paired Samples t-Test (Skor Total)

Statistik	Nilai
t-statistic	27,21
df	52
p-value	< 0,001
Mean Difference	1,5
Cohen's d	3,74

Peningkatan pemahaman tersebut tidak terlepas dari pendekatan partisipatif yang digunakan dalam pelatihan. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga melakukan simulasi menggunakan data keuangan kelompok sendiri. Pendekatan ini memudahkan anggota menghubungkan konsep tata kelola keuangan dengan praktik yang mereka hadapi sehari-hari sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami. Diskusi yang berlangsung selama kegiatan juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa sistem pembagian SHU yang adil merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga partisipasi dan keberlanjutan aktivitas ekonomi kelompok.

Transformasi Sistem Perhitungan SHU

Penyusunan Formula SHU yang Lebih Berkeadilan

Salah satu capaian utama kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya formula pembagian SHU yang lebih proporsional melalui proses musyawarah partisipatif antara pengurus dan anggota. Sebelum kegiatan, seluruh SHU dibagikan kepada seluruh anggota secara sama rata. Mekanisme tersebut tidak mempertimbangkan partisipasi anggota baik dalam aktivitas simpanan, aktivitas pinjaman, maupun kontribusinya sebagai pengurus.



Gambar 4. Presentasi Implementasi Sistem oleh Pengurus PKK

Melalui kegiatan pendampingan, mitra berhasil menyepakati secara musyawarah formula baru yang mengalokasikan SHU ke dalam beberapa komponen, yaitu dana cadangan, dana sosial, dana pengurus, jasa modal, dan jasa usaha (lihat Tabel 7). Dalam formula tersebut, proporsi jasa usaha ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan jasa modal sebagai upaya mendorong anggota untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas pinjaman secara produktif.

Tabel 7. Formula pembagian SHU berbasis kontribusi anggota

Komponen SHU	Persentase	Dasar Perhitungan	Tujuan
Dana Cadangan	30%	SHU total	Menjaga keberlanjutan dana kelompok
Jasa Modal	25%	Proporsi simpanan anggota	Menghargai kontribusi simpanan
Jasa Usaha	35%	Aktivitas pinjaman anggota	Menghargai penggunaan layanan
Dana Sosial	5%	SHU total	Kegiatan sosial kelompok
Dana Pengurus	5%	SHU total	Insentif pengelola

Kesepakatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pengelolaan SHU dari orientasi pemerataan semata menjadi instrumen untuk memperkuat keberlanjutan organisasi sekaligus menciptakan keadilan distribusi manfaat ekonomi bagi anggota. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip partisipasi ekonomi anggota yang menempatkan besar kontribusi sebagai dasar distribusi manfaat yang diterima anggota sebagaimana dikemukakan oleh International Cooperative Alliance (1995) maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (1992).

Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru

Analisis perbandingan antara sistem lama dengan sistem baru (lihat Tabel 8) menunjukkan bahwa sistem pembagian SHU sebelum pendampingan memiliki keunggulan dari sisi kesederhanaan administrasi, namun tidak mencerminkan SHU yang berkeadilan, yaitu yang berlandaskan pada partisipasi ekonomi anggota. Anggota yang berpartisipasi aktif baik sebagai penyedia modal maupun sebagai peminjam mendapatkan SHU yang sama dengan anggota pasif.

Tabel 8. Perhitungan dan alokasi SHU: Perbandingan sebelum dan sesudah pelatihan

Aspek	Sebelum Pelatihan: SHU sama rata	Sesudah Pelatihan: SHU berbasis kontribusi
Besar SHU Bulanan	Dihitung dari pendapatan bunga dikurangi biaya operasional, biaya bunga pemodal, dan biaya dana sosial pada bulan tersebut	Dihitung dari pendapatan bunga dikurangi biaya operasional dan biaya bunga pemodal.
Pendapatan bunga pada bulan tersebut	Pendapatan yang diterima dari peminjam atas jumlah pinjaman yang diterima dengan tingkat bunga sebesar 2,5% per bulan	Pendapatan yang diterima dari peminjam atas jumlah pinjaman yang diterima dengan tingkat bunga sebesar 2,5% per bulan
Biaya Operasional pada bulan tersebut	Terdiri dari biaya administrasi, dan biaya konsumsi rapat rutin dan bantuan sosial anggota.	Terdiri dari biaya administrasi dan subsidi konsumsi rapat rutin.
Biaya bunga pemodal	Pengeluaran yang dibayarkan pada pemilik modal atas dana yang ditempatkan dengan tingkat bunga sebesar 1,5% per bulan	Pengeluaran yang dibayarkan pada pemilik modal atas dana yang ditempatkan dengan tingkat bunga sebesar 1,5% per bulan
Besar SHU Tahunan	Akumulasi SHU bulanan selama 12 bulan.	Akumulasi SHU bulanan selama 12 bulan.
Metode Alokasi SHU Tahunan	Seluruh SHU tahunan dibagikan sama rata kepada seluruh anggota tanpa mempertimbangkan tingkat partisipasi.	SHU dibagikan berdasarkan prinsip jasa modal dan jasa usaha setelah dikurangi dana cadangan, dana sosial, dan dana pengurus.
Konsekuensi	Semua anggota menerima pembagian SHU secara sama rata	Anggota menerima SHU secara proporsional berdasarkan kontribusi simpanan (jasa modal) dan aktivitas pinjaman (jasa usaha).
	Tidak ada alokasi untuk: dana cadangan, dana sosial, dana pengurus	Ada alokasi untuk: dana cadangan, dana sosial, dana pengurus

Sebaliknya, sistem baru menghubungkan secara langsung tingkat kontribusi anggota dan manfaat ekonomi yang diterima. Anggota memperoleh bagian SHU berdasarkan kombinasi jasa modal, jasa usaha, dan aktivitasnya sebagai pengurus, sehingga distribusi manfaat menjadi lebih proporsional. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip partisipasi ekonomi anggota (International Cooperative Alliance, 1995) yang menempatkan kontribusi sebagai dasar utama pembagian manfaat organisasi.

Dari perspektif tata kelola, perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan keadilan distributif, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan organisasi karena formula baru disusun melalui proses musyawarah yang melibatkan anggota secara aktif. Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif *distributive justice*, yaitu prinsip bahwa manfaat yang diterima anggota organisasi seharusnya sebanding dengan kontribusi yang diberikan (Adams, 1965; Colquitt et al., 2001). Pada sistem sebelumnya, anggota yang berkontribusi lebih besar terhadap aktivitas usaha kelompok mendapatkan SHU yang sama dengan anggota yang kontribusinya lebih kecil atau bahkan tidak memberikan kontribusi, karena SHU dibagikan sama rata kepada semua anggota. Sebaliknya, formula baru mengadopsi kontribusi anggota sebagai dasar SHU yang diterima anggota.

Dari sudut pandang *economic participation principle* (International Cooperative Alliance, 1995), mekanisme ini memberikan insentif bagi anggota yang berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan simpan pinjam karena setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan akan tercermin dalam besaran SHU yang diterima oleh masing-masing anggota. Prinsip partisipasi ekonomi anggota menegaskan bahwa anggota tidak hanya berkontribusi sebagai pemilik modal, tetapi juga sebagai pengguna layanan organisasi, sehingga manfaat ekonomi yang diterima seharusnya terkait dengan tingkat kontribusi. Perubahan formula SHU yang disepakati dalam program ini tidak hanya meningkatkan persepsi keadilan anggota, tetapi juga berpotensi memperkuat keberlanjutan organisasi karena sistem tersebut mendorong peningkatan partisipasi ekonomi anggota dalam aktivitas usaha kelompok (Novkovic, 2008).

Digitalisasi Pencatatan Keuangan dan Transparansi Pengelolaan SHU

Sebelum kegiatan pelatihan, seluruh transaksi dicatat secara manual dalam buku besar sehingga proses penelusuran data, verifikasi transaksi, dan penyusunan laporan membutuhkan waktu yang relatif lama serta rentan terhadap kesalahan pencatatan. Selain perubahan formula pembagian SHU, kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan sistem pencatatan keuangan berbasis *spreadsheet* sederhana yang dirancang sesuai kebutuhan organisasi. Ilustrasi dari sistem pencatatan keuangan berbasis *spreadsheet* ditunjukkan oleh Gambar 5.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		JANUARI						FEBRUARI
2	UNIT USAHA SIMPAN PINJAM							
3	Persuteraan Usaha		100.000.000					
4	MODAL ANGGOTA	100.000.000						
5	HUTANG ANGGOTA		100.000.000					
6	Pendapatan 2,5 persen			2500000				
7	Biaya Bunga 1,5 persen			1500000				
8	Biaya Konsumsi dan Alat Tulis			400000				
9	Sisa Hasil Usaha Bulan berjalan			600000				
10	Dana Cadangan 30 persen			180000				
11	Dana Sosial 5 persen			30000				
12	Dana Pengurus 5 persen			30000				
13	Jasa Modal 25 persen			150000				
14	Jasa Usaha 35 persen			210000				
15								
16	NAMA ANGGOTA	SIMPANAN	HUTANG	JASA MODAL	JASA USAHA	SHUB	SHUK	SIMPANA HI
17	ANI	100000000	0	15000	0	15000	15000	
18	BINTI	30000000	0	45000	0	45000	45000	
19	CILA	60000000	0	90000	0	90000	90000	
20	DIAN	0	30.000.000	0	63000	63000	63000	
21	EKA	0	20.000.000	0	42000	42000	42000	
22	FLO	0	0	0	0	0	0	
23	GREE	0	20.000.000	0	42000	42000	42000	
24	HASNI	0	0	0	0	0	0	
25	IAA	0	30.000.000	0	63000	63000	63000	
26	JES	0	0	0	0	0	0	
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Gambar 5. Ilustrasi pencatatan sistem pembagian SHU berbasis *spreadsheet*

Melalui sistem *spreadsheet* yang dikembangkan dalam kegiatan ini, pengurus dapat mencatat simpanan anggota, transaksi pinjaman, pembayaran bunga, serta menghitung SHU secara otomatis. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga membantu pengurus menghasilkan laporan keuangan yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Temuan ini sejalan dengan berbagai kegiatan pendampingan sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan *spreadsheet* sederhana mampu meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi pencatatan, dan kualitas layanan kelompok simpan pinjam berbasis masyarakat (Hermawan et al., 2026; Sam et al., 2026).

Dampak penting dari implementasi sistem berbasis *spreadsheet* ini adalah meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan kelompok. Anggota tidak lagi hanya menerima informasi mengenai jumlah SHU yang diterima, tetapi juga dapat memahami komponen pembentuk SHU dan dasar perhitungan yang digunakan. Dengan demikian, proses distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih terbuka dan dapat diverifikasi bersama oleh anggota maupun pengurus. Peningkatan transparansi tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan anggota terhadap organisasi. Keterbukaan informasi mengurangi potensi kesalahpahaman terkait pembagian SHU sekaligus memperkuat akuntabilitas pengurus dalam mengelola dana kelompok. Temuan ini mendukung hasil penelitian Hasan et al (2025) yang menegaskan bahwa

transparansi dalam distribusi manfaat ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kepercayaan anggota dan menjaga keberlanjutan organisasi berbasis komunitas.

Penguatan Keberlanjutan

Keberlanjutan program merupakan aspek penting dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena manfaat program sering kali menurun ketika tidak diikuti oleh penguatan kapasitas internal organisasi (Khasanah et al., 2025). Oleh karena itu, pendampingan tidak hanya difokuskan pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas internal organisasi. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, dua orang kader PKK telah dilatih sebagai operator internal yang bertanggung jawab mengelola sistem pencatatan keuangan dan perhitungan SHU. Keberadaan operator internal ini memungkinkan transfer pengetahuan yang telah diperoleh selama kegiatan tetap terjaga meskipun pendampingan dari tim pengabdian telah berakhir. Dengan terbentuknya kapasitas internal tersebut, transformasi tata kelola keuangan yang telah dilakukan tidak bergantung pada keberadaan pihak eksternal, melainkan telah menjadi bagian dari sistem kerja organisasi. Kondisi ini menjadi modal penting bagi kelompok simpan pinjam PKK RW 03 Desa Kendalpecabean untuk terus berkembang sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kepuasan Mitra

Tingkat kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian diidentifikasi melalui indikator perilaku dan respons peserta selama maupun setelah kegiatan berlangsung. Pertama, seluruh peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga penutupan tanpa ada peserta yang meninggalkan kegiatan sebelum selesai. Selain itu, peserta terlibat secara aktif dalam sesi diskusi dengan mengajukan pertanyaan, menyampaikan masukan, serta berbagi pengalaman terkait permasalahan yang dihadapi. Tingginya keterlibatan peserta ini mengindikasikan bahwa materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan mereka.

Kedua, seluruh peserta mampu menyelesaikan tugas dan latihan yang diberikan selama kegiatan. Keberhasilan peserta dalam menyelesaikan tugas tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diaplikasikan dalam konteks permasalahan yang dihadapi mitra. Hal ini juga didukung oleh adanya peningkatan kemampuan peserta setelah pelatihan, yang terlihat dari meningkatnya pemahaman mereka terhadap konsep dan prosedur yang diperkenalkan dalam program pengabdian.

Ketiga, pada sesi penutupan kegiatan, perwakilan mitra menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim pengabdian atas pendampingan yang telah diberikan. Mitra menyatakan bahwa kegiatan ini membantu mereka memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang sebelumnya menjadi kendala dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Umpan balik positif tersebut merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa kegiatan telah memberikan manfaat yang nyata bagi mitra.

Keempat, kepuasan mitra juga tercermin dari adanya komitmen untuk mengimplementasikan hasil kegiatan secara berkelanjutan. Mitra menyatakan kesediaannya untuk menerapkan pengetahuan dan prosedur yang telah diperoleh serta mengharapkan adanya kerja sama lanjutan dengan tim pengabdian pada kegiatan berikutnya. Keinginan untuk mempertahankan hubungan kemitraan tersebut menunjukkan tingkat penerimaan dan kepuasan yang tinggi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Secara keseluruhan, berbagai indikator tersebut mengonfirmasi bahwa kegiatan pengabdian berhasil memenuhi kebutuhan mitra dan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh peserta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di RW 03 Desa Kendalpecabean, Sidoarjo, berhasil memperkuat tata kelola keuangan (*financial governance*) kelompok simpan pinjam PKK melalui pendekatan *participatory capacity building*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan

mampu meningkatkan secara signifikan pemahaman anggota mengenai konsep dasar dan mekanisme perhitungan SHU, dari kategori rendah-sedang menjadi kategori sangat baik, dengan persebaran pengetahuan yang lebih merata antar anggota.

Transformasi sistem pembagian SHU dari metode "sama rata" menjadi metode proporsional berbasis kontribusi (jasa modal, jasa usaha, dan aktivitas kepengurusan) telah berhasil mengimplementasikan prinsip keadilan sesuai standar organisasi keuangan mikro berbasis komunitas. Selain itu, digitalisasi pencatatan melalui format *spreadsheet* sederhana terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan anggota terhadap organisasi. Secara keseluruhan, penguatan kapasitas kelembagaan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan fungsi PKK sebagai organisasi keuangan mikro berbasis komunitas yang mandiri dan profesional.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar kelompok PKK mulai menjajaki penggunaan aplikasi keuangan berbasis seluler untuk mempermudah akses pemantauan simpanan anggota secara *real-time*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (pp. 267–299). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60108-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2)
- Alshebami, A. S., & Murad, M. (2022). The moderation effect of entrepreneurial resilience on the relationship between financial literacy and sustainable performance. *Frontiers in Psychology*, 13, 954841. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.954841>
- Asbaruna, L. A. B., Gorib, R. I., Sarusu, A. M., Suherman, J., & Ambarwati, S. D. (2026). Digital Transformation Assistance for Cooperative Financial Reports to Increase Transparency and Accountability. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 6(1), 62–67. <https://doi.org/10.57152/consen.v6i1.2598>
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2025). Peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1043–1052. <https://doi.org/doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates
- Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., & Ng, K. Y. (2001). Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 425–445. <https://doi.org/10.1037//0021-9010.86.3.425>
- Danquah, J. K., Crocco, O. S., Mahmud, Q. M., Rehan, M., & Rizvi, L. J. (2023). Connecting concepts: bridging the gap between capacity development and human resource development. *Human Resource Development International*, 26(3), 246–263. <https://doi.org/10.1080/13678868.2022.2108992>
- Douthwaite, B., Proietti, C., Polar, V., & Thiele, G. (2023). Outcome Trajectory Evaluation (OTE): An Approach to Tackle Research-for-Development's Long-Causal-Chain Problem. *American Journal of Evaluation*, 44(3), 335–352. <https://doi.org/10.1177/10982140221122771>
- Eade, D. (1997). *Capacity-Building: An Approach to People-Centred Development*. Oxfam GB.
- Gultom, R. H., Sinurat, N. A., Sirait, J. A., & Matondang, K. A. (2025). Dampak pembagian sisa hasil usaha tidak sesuai terhadap keharmonisan koperasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6). <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.10089>
- Hasan, Z., Abduh, M., & Rosman, R. (2025). Transparency, Accountability, and Customer Trust in Islamic Banking: A Panel Data Analysis from Selected OIC Countries. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 4(2), 915–935. <https://doi.org/10.14421/jmes.2025.042-04>

- Hermawan, K. N. A., Darmayasa, I. N., & Arazy, D. R. (2026). Pengembangan Sistem Pencatatan Keuangan Otomatis Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Berbasis Microsoft Excel. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 10(1), 14–26. <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/2895>
- International Cooperative Alliance. (1995). *Statement on the cooperative identity*. <https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles>
- Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- Jamaluddin, F., Saleh, N. M., Abdullah, A., Hassan, M. S., Hamzah, N., Jaffar, R., Ghani Aziz, S. A. A., & Embong, Z. (2023). Cooperative governance and cooperative performance: A systematic literature review. *Sage Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231192944>
- Jensen, A. C. H., & Naveed, A. (2025). Assessing the Role of Microfinance in Mitigating Income Inequality: New Evidence from a Global Context. *Social Indicators Research*, 179(1), 371–397. <https://doi.org/10.1007/s11205-025-03608-8>
- Kacou, K. P., Ika, L. A., & Munro, L. T. (2022). Fifty years of capacity building: Taking stock and moving research forward. *Public Administration and Development*, 42(4), 215–232. <https://doi.org/10.1002/pad.1993>
- Kassim, S., Hassan, R., & Kassim, S. N. S. Y. (2018). Good Governance and Sustainability in Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Finance*, 7(2), 21–28. <https://doi.org/10.31436/jif.v7i2.298>
- Khasanah, F. N., Putri, A. P., & Ramadhan, F. A. (2025). Implementasi Portal Warga Untuk Pencatatan Data Warga Pada Lingkungan RT 004 Warga Desa Tambun. *Darma Abdi Karya*, 4(2). <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/darmaabdikarya/article/view/2766>
- Kusumah, N. D., & Novani, S. (2024). The Economic Impact, Contributing Factor and Value Co-Creation of Community-Based Microfinance-An Exploratory Study of Bank Infaq in South Tangerang District Indonesia. *International Research Journal of Economics and Management Studies (IRJEMS)*, 3(6). <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I6P135>
- Novkovic, S. (2008). Defining the Co-operative Difference. *The Journal of Socio-Economics*, 37(6), 2168–2177. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2008.02.009>
- Renz, D. O., Brown, W. A., & Andersson, F. O. (2023). The evolution of nonprofit governance research: Reflections, insights, and next steps. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 52. <https://doi.org/10.1177/08997640221111011>
- Sam, I., Kusumastuti, R., Gowon, M., Sumarni, S., & Heriyani, H. (2026). Penguatan Penataan Sistem Administrasi Kegiatan dan Arsip Keuangan Kelurahan Berbasis Digital di Kantor Lurah Olak Kemang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2768–2775. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.850>
- Sangwa, Y., Ndaruhutse, V., Radeny, S., Ndatimana, D., Niragire, F., Rutayisire, E., Mukamana, B., Uwamariya, J., Kabanda, C., Nyirafaranga, A., & Uzayisenga, M. C. (2024). Using eLearning to improve and retain the knowledge of community health workers in maternal and neonatal health in Rwanda: A cohort study. *Public Health Challenges*, 3(2).
- Shah, S. A., Abidi, S. H., Soomro, A. A., Farooqui, N., Ansari, T., & Khanani, R. (2024). Evaluation of the training program to train HIV treatment center staff in Pakistan. *Cureus*, 16(6). <https://doi.org/10.7759/cureus.61972>
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3/4), 591–611. <https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591>
- Student. (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25. <https://doi.org/10.1093/biomet/6.1.1>
- Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80–83. <https://doi.org/10.2307/3001961>